

Kapolda Jateng Berikan Kuliah Umum

SEMARANG (KR) - Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi memberikan kuliah umum wawasan Kebangsaan kepada Mahasiswa Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Rabu (8/5) di Balaiung Kampus (UPGRIS) Jalan Sidodadi Timur Karang Tempel Kota Semarang. Kuliah umum dihadiri Rektor Universitas PGRI Semarang Dr Sri Suciati MHum, PJU Polda Jateng dan peserta Mahasiswa lebih dari 2000 orang.

Kegiatan tersebut merupakan Kepedulian Irjen Pol Ahmad Luthfi kepada generasi milenial yang merupakan aset bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas. Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi menyatakan perbedaan adalah rahmat bagi bangsa Indonesia. "Perbedaan adalah rahmat bagi Indonesia, saat Pemilu masyarakat terbelah, tugas Polda Jateng mengawal agar Demokrasi berlangsung damai," terang Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Kapolda Jateng sambil menyebutkan kehadiran Polri di masyarakat merupakan representasi kehadiran negara. Di setiap kegiatan mahasiswa, termasuk saat demo Polri akan hadir untuk melayani, yang perlu di ingat jangan melanggar Hak hak orang lain", ungkap Kapolda Jateng. (Cry)-f



KR-Karyono

Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi di tengah mahasiswa UPGRIS.

Calhaj Asal Magelang Diberangkatkan

MAGELANG (KR) -Jemaah calon haji dari Kabupaten Magelang rencana diberangkatkan dari kompleks Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Magelang di Sawitan Magelang mulai Sabtu (11/5) pagi ini hingga Minggu (12/5) dini hari. Hingga Jumat (10/5) pukul 10.30 jumlahnya mengalami perubahan. Salah satu calon jemaah haji dari wilayah Kecamatan Mertoyudan Magelang Bambang, mengatakan waktu pemberangkatannya mengalami perubahan. Hal ini juga dibenarkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang M Miftah, Jumat (10/5).

Dikatakan M Miftah, calon jemaah haji dari Kabupaten Magelang terbagi dalam beberapa kelompok terbang (kloter), yaitu Kloter 2, 3, 4 dan 5. Masing-masing kloter berbeda waktu pemberangkatannya, termasuk jam kedatangannya di Komplek Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Magelang di Sawitan Magelang. Juga disampaikan para calon jemaah haji dari Kabupaten Magelang diminta untuk terus menjaga kesehatannya mengingat cuaca atau udaranya cukup terik.

Informasi yang diperoleh KR dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, Jumat kemarin, menyebutkan kalau sebelumnya untuk kloter 2 kedatangan di Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Magelang di Sawitan Magelang dijadwalkan pukul 04.00, dan berangkat dari Sekretariat Pemerintah Kabupaten Magelang di Sawitan Magelang menuju Donohudan pukul 06.00, berubah jam kedatangannya di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Magelang di Sawitan Magelang pukul 08.00 dan berangkat dari Sekretariat Pemerintah Kabupaten Magelang di Sawitan Magelang menuju Donohudan pukul 10.00.

Perubahan waktu ini juga dialami rombongan kloter 3, 4 dan 5. Kalau sebelumnya untuk kloter 5 kedatangan di Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Magelang di Sawitan Magelang dijadwalkan pukul 14.00 dan berangkat dari Sekretariat Pemerintah Kabupaten Magelang di Sawitan Magelang menuju Donohudan pukul 16.00, mengalami perubahan jam kedatangan di Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Magelang di Sawitan Magelang dijadwalkan pukul Hari Minggu (12/5) pukul 01.00 dan berangkat dari Sekretariat Pemerintah Kabupaten Magelang di Sawitan Magelang menuju Donohudan pukul 03.00. (Tha)-f

Pendaftaran PPS Pilkada 2024 Diperpanjang

SUKOHARJO (KR) - Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pelaksanaan Pilkada 2024 diperpanjang selama tiga hari setelah kuota yang dibutuhkan belum terpenuhi. Sebab sejak pendaftaran dibuka 2-8 Mei masih ada 121 desa dan kelurahan belum memenuhi jumlah pendaftar dua kali kebutuhan. Perpanjangan dimulai 9-11 Mei 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo, (10/5) mengatakan, KPU Sukoharjo sudah melakukan perpanjangan pendaftaran PPS Pilkada 2024 dengan sosialisasi ke masyarakat. Waktu pendaftaran yang diperpanjang selama tiga hari diharapkan ada tambahan pendaftar. Sebab dari total 167 desa dan kelurahan di Kabupaten Sukoharjo masih ada 121 desa dan kelurahan belum memenuhi jumlah pendaftar dua kali kebutuhan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari dua kali jumlah PPS yang dibutuhkan. Kemudian, membuka satu kali perpanjangan waktu pendaftaran selama tiga hari.

"Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Sukoharjo, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024," ujarnya. Syakbani menegaskan, masih ada 121 desa dan kelurahan tersebar di 12 Kecamatan yang belum memenuhi 2 kali kebutuhan. Maka, diharapkan, kepada warga masyarakat Kabupaten Sukoharjo untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Sukoharjo dengan menjadi bagian dari PPS. (Mam)-f

Pansus VII DPRD Grobogan Bahas Raperda Perusda Purwa Aksara



GEMA DPRD KAB. GROBOGAN

GROBOGAN (KR) - Pansus VII Tahun 2023 DPRD Grobogan, Rabu (8/5) membahas Raperda Perusda Purwa Aksara hasil fasilitasi Gubernur Jateng. Rapat dipimpin Ketua Pansus VII Lusida Indah Artiani, dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Setda, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekwan, Kabag Hukum Setda, dan Kabag Perekonomian dan Sumber Alam.

Dalam penjelasannya, Ketua Pansus VII Tahun 20-23 DPRD Grobogan Lusida Indah Artiani mengatakan, bahwa pembahasan atas Raperda tentang Perusda Purwa Aksara telah diselesaikan, dimana hasilnya juga telah disampaikan kepada Gubernur Jateng untuk difasilitasi dan kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/965 Tahun 2024 tanggal

24 April 2024.

"Untuk itu, guna menindaklanjuti hasil fasilitasi tersebut, maka kita laksanakan Rapat Kerja Pansus VII Tahun 2023, bersama dengan OPD terkait. Selanjutnya hasil penyempurnaan atas hasil fasilitasi Gubernur ini akan dimintakan persetujuan anggota DPRD Grobogan dalam Rapat Paripurna sesuai jadwal yang telah ditetapkan," terangnya.

Sebelum mendapat fasilitasi Gubernur, Pansus VII telah membahas dan menyempurnakan raperda tersebut dengan mengundang Sekda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Setda, Kepala BPPKAD, Kepala Bappeda, Kabag Perekonomian dan SDA Setda, Kabag Organisasi Setda, Kabag Hukum Setda, dan Direktur Peruda Purwa Aksara. Sebelumnya, Bupati

Grobogan Sri Sumami menjelaskan, Raperda Perusda Purwa Aksara diperlukan dalam rangka menindaklanjuti penawaran dalam pengelolaan Participating Interest dimaksud. Oleh karenanya, dalam raperda ini, bidang usaha dari Perusda Purwa Aksara ditambah dengan pengelolaan hulu minyak dan gas bumi. Selain penambahan bidang usaha tersebut, materi muatan yang terdapat dalam raperda ini antara lain terkait dengan pengaturan mengenai maksud dan tujuan, nama, kedudukan,

paripurna ke-41 DPRD Grobogan, belum lama ini.

Penyesuaian dimaksud, kata bupati, di antaranya terkait dengan kewenangan pendirian anak perusahaan serta penambahan bidang usaha yang sejalan dengan pengelolaan Participating Interest dimaksud. Oleh karenanya, dalam raperda ini, bidang usaha dari Perusda Purwa Aksara ditambah dengan pengelolaan hulu minyak dan gas bumi. Selain penambahan bidang usaha tersebut, materi muatan yang terdapat dalam raperda ini antara lain terkait dengan pengaturan mengenai maksud dan tujuan, nama, kedudukan,

jangka waktu pendirian dan unit usaha, anggaran dasar, modal, organ perusahaan, pegawai, perencanaan, pembagian laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada perusahaan, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, kerja sama, dan pembubaran.

Selain adanya peluang mengelola minyak dan gas di Lapangan RBG Blok 1 Wilayah Kerja Blora di Kabupaten Grobogan, penyusunan raperda tersebut untuk menyesuaikan peraturan daerah yang telah dimiliki dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

"Mengingat penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara dilakukan sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka tentu terdapat ketentuan yang harus disesuaikan. Hal ini perlu dilakukan agar peraturan daerah yang kita miliki senantiasa selaras dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," ujar bupati. (Tas)-f



KR-M Taslim

Rapat Pansus VII Tahun 2023 saat membahas hasil fasilitasi Gubernur tentang Raperda Perusda Purwa Aksara.

Ahmad Luthfi Mendapat Ucapan dari Ketua MUI Jateng

SEMARANG (KR) - Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi gelar silaturahmi kamtibmas. Silaturahmi yang digelar, Rabu (7/5) malam di Lapangan Apel Mapolda Jateng, jalan Pahlawan Semarang dihadiri Ketua dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia, Dewan Kemakmuran Masjid, Badan Komunikasi dan Lembaga Pendidikan Al Quran Provinsi Jateng.

Ketua MUI Provinsi Jateng Dr KH Ahmad Darodji, mewakili umat Islam yang mudik berterima kasih kepada Irjen Pol Ahmad Luthfi selaku Kapolda Jateng "Atas nama umat Islam yang kemarin mudik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda karena mudik lancar dan kejadian (Laka lantas) sedikit. Kita doakan agar Pak

Kapolda diberikan Kesehatan, Keselamatan dan lancar hajatnya," tutur Dr KH Ahmad Darodji. Ketua MUI Provinsi Jateng berharap kepada Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi untuk bisa terus bersama membangun Jawa Tengah menjadi lebih baik "Semoga Bapak Kapolda bisa bersama-sama kita untuk membangun Jawa

Tengah ini menjadi lebih baik", ungkap Dr. K.H. Ahmad Darodji mengakhiri sambutan.

Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan tujuan silaturahmi malam ini mohon doa para Alim ulama agar Polda Jateng semakin baik dalam melayani masyarakat. "Malam ini, Lapangan Polda Jawa Tengah menjadi saksi se-

jarah, telah berkumpul Alim ulama se Jawa Tengah. Malam ini kita mencari berkah dari para Ustad yang hadir, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik, inilah tugas Polisi Amar ma'ruf nahi munkar," kata Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Kapolda menjelaskan bahwa Polda Jawa Tengah akan melaksanakan pengamanan Pilkada serta meminta dukungan agar Kamtibmas tetap kondusif. "Ke depan akan di laksanakan pengamanan Pilkada, kita ketahui demokrasi intinya perbedaan yang itu meru-

pakan rahmat bagi bangsa Indonesia, dengan semangat gotong royong dan nilai-nilai persatuan mari kita tunjukkan Jateng akan aman dalam gelaran Pemilu," kata Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Kapolda Jateng meminta masyarakat untuk bersama sama menjadi cooling system di wilayahnya masing masing "Saya mohon kepada bapak ibu, kembalinya ke wilayah, Mari kita dinginkan masyarakat untuk menimbulkan demokrasi yang sehat, siapapun yang terpilih itu merupakan yang terbaik " pungkas Irjen Pol Ahmad Luthfi. (Cry)-f

SCU Lakukan Riset Pendekatan Rumah Adaptif Banjir

SEMARANG (KR)-Masalah banjir seakan masih menjadi momok bagi masyarakat Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang dan sekitarnya. Tingginya curah hujan yang melanda berbagai daerah di Indonesia beberapa waktu lalu menyebabkan terjadinya banjir rob berulang di Kabupaten Demak.

Menurut data Posko Korban Banjir Demak di Terminal Kudus Maret 2024, ada 38 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Demak yang terdampak banjir saat itu. Selain Demak, Kabupaten Kudus dan Grobogan juga sempat dilanda banjir akibat tingginya curah hujan saat itu. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Februari 2024, ada 32 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Grobogan yang terendam banjir saat itu.

Tim Pusat Studi Manusia, Lingkungan, dan Teknologi (MLT) Soegijapranata Catholic University (SCU), Dr. Robert Riyanto melihat krusialnya desain rumah ketika bicara daerah rawan banjir. Bukan hanya mencegah, ia pun menilai bangunan tersebut juga harus bisa bertahan pasca banjir.

"Menjadi menyulitkan karena tidak ada persiapan setelahnya. Jadi penting untuk membuat rumah yang bisa cepat recovery setelah banjir. Barang pun juga bisa terselamatkan," tegasnya. Sejalan dengan itu, penting menurutnya membuat banyak ventilasi di dekat lantai. Hal ini dinilai dapat membuka ruang keluarannya air, sehingga mempercepat surotnya genangan di dalam rumah.

Menghadapi banjir rob berulang, dosen Program Studi Arsitektur SCU, Ir. Bambang Suskiyatno, MT melihat Rumah Hidrolis menjadi solusi yang tepat. Dikenal juga dengan nama "Ompalis," karya paten Tim Dosen Program Studi Arsitektur SCU tersebut mengusung rumah yang bisa énaiki menyesuaikan ketinggian genangan rob. Rumah ini pun dinilai dapat bertahan meng-

hadapi rob hingga lebih dari 20 tahun. "Setiap periode tertentu bisa dinaikkan, didongkrak bareng sehingga lantainya juga ikut naik. Bentuknya terlihat seperti panggung," jelas Ir. Bambang.

Merujuk pada konsep eco-settlement, gagasan tersebut merupakan hasil riset Pusat Studi MLT SCU bersama Dinas Perumahan dan Wilayah Permukiman Kabupaten Demak dalam pendekatan desain rumah adaptif banjir. Webinar ini pun mengundang antusiasme berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga pemerintahan, akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, masyarakat umum, serta pemerhati lingkungan. Hal tersebut disampaikan dalam Webinar SCU for Indonesia

Kabupaten Demak dalam pendekatan desain rumah adaptif banjir. Webinar ini pun mengundang antusiasme berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga pemerintahan, akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, masyarakat umum, serta pemerhati lingkungan. Hal tersebut disampaikan dalam Webinar SCU for Indonesia

Forum ini membahas strategi kebijakan pembangunan berkelanjutan di wilayah terdampak banjir, termasuk dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam mitigasi dan rekonstruksi banjir serta dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak banjir juga menjadi fokus bahasan dalam diskusi ini. (Sgi)-f

Mimbar Legislatif

DPRD Harus Cermat Kritis LKPj Gubernur 2023

KETUA DPRD Jateng Sumanto mengajak kepada seluruh anggota DPRD Jawa Tengah untuk fokus dalam mengkaji laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Tengah 2023, khususnya yang terkait dengan upaya Pemprov dalam mengurangi angka kemiskinan dan stunting.

Demikian ditegaskan Sumanto saat membuka workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Jateng dengan mengangkat tema iPeran DPRD dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, di Surakarta pekan lalu. Penyelenggaraan workshop dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus (LPPM Untag) Semarang. Diharapkan di forum workshop ini bisa untuk mempertajam dan memperkaya wawasan terkait LKPJ.

DPRD Jateng berharap dalam workshop, seluruh anggota DPRD Jawa Tengah lebih cermat khususnya mereka yang menjadi anggota Pansus X untuk menyikapi LKPJ Gubernur. Dalam menilai LKPJ, khususnya laporan outputnya

catatan strategis serta sebaiknya bagaimana. Adapun sasaran yang diharapkan dari diselenggarakannya workshop ini, agar anggota DPRD mampu memahami bentuk pertanggungjawaban kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan, dan mampu memahami fungsi pengawasan DPRD.

Rektor Untag Prof Suparno mengatakan, tujuan diselenggarakannya workshop adalah memfasilitasi anggota DPRD guna meningkatkan peran dan fungsi pengawasan terhadap LKPJ Kepala Daerah. Materi yang disampaikan dalam workshop ini mencakup tugas pokok dan fungsi DPRD.

Secara materi sangat dibutuhkan karena akan membantu Dewan dalam mengkritisi LKPJ Gubernur, karena uraian tentang serapan dana, kinerja dan lain-lain ada di legislative. Harapannya bisa dibangun suasana forum agar lebih bagus dan berani mengungkapkan fakta yang ada di lapangan. □f

(Disampaikan oleh Ketua DPRD Jateng Sumanto kepada wartawan KR Biro Semarang Budiono Isman-Anf)



KR-Sugeng Irianto

Proses pembuatan rumah ompolis.